



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. AKHMAD SYAMHUDI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 511157

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m²/63 m² di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/100 m² di KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 340.000.000

1. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA RODA 4 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, CALYA TOYOTA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 50.925.677**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.540.925.677

III. HUTANG Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.540.925.677

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.